

e-ISSN: 2614 – 1930

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DALAM UPAYA PEMBINAAN  
KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) RUMAH TAHANAN  
KELAS II B NEGARA  
(Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Negara)**

<sup>1</sup>Made Sita Diaz Octaviani,  
<sup>1</sup>Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, <sup>2</sup>Putu Sukma Kurniawan

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [sitadiazoctaviani@gmail.com](mailto:sitadiazoctaviani@gmail.com), [ekadyanita@undiksha.ac.id](mailto:ekadyanita@undiksha.ac.id), [putusukma1989@gmail.com](mailto:putusukma1989@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan keuangan yang diterapkan pada UMKM, manfaat yang didapatkan oleh staff dan warga binaan pemasyarakatan dengan adanya analisis pengelolaan keuangan pada UMKM, dan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UMKM dalam upaya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di rumah tahanan kelas II B Negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam dari peneliti terhadap sebuah kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis interaktif dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tahanan negara menerapkan pengelolaan keuangan yang sangat sederhana yang terdiri dari perencanaan, pencatatan, dan pengendalian. Manfaat yang didapatkan oleh staff dan narapidana dengan adanya UMKM dalam upaya pembinaan adalah staff tidak mendapatkan apapun dari hasil kegiatan UMKM, tetapi staff hanya menjalankan tugas dan mengabdikan saat bekerja dalam rumah tahanan, kemudian untuk narapidana mereka mendapatkan bekal ilmu agar kelak apabila telah bebas narapidana bisa kembali ke tengah masyarakat dan berguna bagi orang banyak. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UMKM dalam upaya pembinaan dilakukan untuk pihak internal saja dimana mengingat UMKM sendiri tidak mendapatkan anggaran apapun dari pemerintah pusat untuk menjalankan kegiatan.

Kata kunci: pengelolaan keuangan, UMKM, transparansi dan akuntabilitas.

*Abstract*

*This study aimed to investigate the financial management applied to UMKM, the benefits obtained by staff and inmates due to the existence of financial management analysis in UMKM and accountability as well as transparency in the management of UMKM finances in an effort to foster the development of prison class IIB Negara inmates. This research was conducted by using a qualitative method that emphasized the in-depth understanding of the researcher on a case. The data analysis technique used in this study was interactive analysis with three stages, namely: data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicated that the prison implemented very simple financial management consisting of planning, recording, and controlling. From the presence of the UMKM, the staff did not get anything from UMKM activities; they only carried out duties and served while working in detention centers. For the inmates, they got knowledge so that when they went back to the community it could be useful for many people. The transparency and accountability of UMKM financial management was carried out for internal parties only since the UMKM did not get any budget from the central government in carrying out the activities.*

*Keywords: financial management, UMKM, transparency and accountability.*

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan sosial saat ini mulai marak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari kejahatan yang bersifat kecil sampai dengan kejahatan yang bersifat besar. Kejahatan sosial timbul karena adanya masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial ini disebabkan karena adanya ketidak idealan keadaan di dalam masyarakat. Masalah sosial akan selalu ada apalagi didukung dengan keadaan Indonesia yang bersifat heterogen ini. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Unsur-unsur yang ada di masyarakat dapat menimbulkan gangguan terhadap hubungan sosial jika mengalami suatu gesekan atau bentrokan. Akibatnya, kehidupan suatu masyarakat atau kelompok akan goyah.

Kejahatan sosial ini bisa berasal dari dalam diri dan bisa juga karena faktor keadaan lingkungannya. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma-norma dan hukum. Keadaan Indonesia yang bersifat heterogen tentunya keadaan masyarakatnya memiliki keinginan-keinginan serta ambisi-ambisi yang berbeda. Keinginan pemenuhan kebutuhan yang tinggi tanpa didukung dengan kemampuan individu tersebut tentu akan menimbulkan tindakan yang kurang wajar untuk dapat mencapainya sehingga akan menimbulkan serta mendorong individu tersebut untuk melakukan suatu tindakan kriminal yang bahkan tindakan kriminal tersebut akan membawa individu tersebut ke ranah hukum bahkan sampai ditahan didalam jeruji besi.

Apabila seorang telah memasuki ranah hukum bahkan sampai memasuki jeruji besi, seorang tersebut perlu untuk di rehabilitasi. Di dalam proses rehabilitasi di dalam rumah

tahanan terdapat berbagai cara yang dimana masing-masing rumah tahanan memiliki cara yang berbeda-beda. Tujuan dari rehabilitasi ini yaitu agar seorang pelaku tersebut merasa jera dan tidak ingin mengulangi tindakannya lagi.

Rumah Tahanan (RUTAN) adalah salah satu institusi yang dimiliki pemerintah yang berfungsi untuk membina warga binaan atau yang biasa disebut dengan Narapidana. Dengan adanya pembinaan seperti ini selain dapat merehab para narapidananya, juga akan menghasilkan individu-individu yang kreatif sehingga apabila narapidana tersebut telah bebas mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan hasil dari ilmu yang merekadapatkan di rumah tahanan tersebut. Dengan timbulnya individu-individu yang kreatif seperti ini selain membuka lapangan pekerjaan juga akan menciptakan bibit-bibit pengusaha yang membuka usahanya melalui UMKM dan dapat membuka sentra-sentra baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi. UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang penggerak utama perekonomian negara. Perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi angka pengangguran di Indonesia dianggap mampu dalam menyelamatkan roda perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan salah satu sektor yang tidak mudah terpengaruh terjadinya perubahan eksternal pada pasar perekonomian. Sebagai salah satu sektor yang tidak rentan terpengaruh pada pengaruh eksternal, UMKM mampu bertahan melawan krisis yang terjadi di suatu negara serta dapat menunjang pembangunan ekonomi yang

stabil, bersifat jangka panjang serta berkesinambungan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. Sejauh ini, UMKM telah berkontribusi sebanyak 57,60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPi dan BI, 2015). Mengingat peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, UMKM merupakan salah satu penyokong yang mampu membangkitkan perekonomian negara. Adanya krisis ini membuat banyak perusahaan besar menjadi bangkrut, namun dalam hal ini UMKM masih tetap bertahan dari gejolak krisis yang terjadi.

Mengingat UMKM merupakan salah satu penyokong perekonomian tentu saja pengelolaan usahanya baik. Namun dalam hal ini masih saja terdapat UMKM yang belum mampu untuk mengelola usahanya dengan baik sehingga membuat UMKM tersebut menjadi gagal dan berujung kebangkrutan. Salah satu hal yang membuat UMKM tersebut gagal serta berujung kebangkrutan yaitu pengetahuan yang dimiliki pemilik UMKM dalam mengelola usahanya. Usaha yang sukses tentu didukung oleh pengelolaan yang baik. Salah satu hal terpenting yaitu didukung pada pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Ediraras (dalam Yustian, 2017) bisnis UMKM yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat

akan memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri, dampak positif pengelolaan keuangan itulah yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan UMKM dan dapat digunakan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya.

Rumah tahanan kelas IIB Negara merupakan salah satu rumah tahanan yang bersifat industri dan memiliki total narapidana & tahanan terbanyak di provinsi Bali. Di dalam rumah tahanan tersebut para narapidananya dibina dalam kegiatan industri pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tujuan daripembinaan ini adalah agar apabila warga binaan telah bebas mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat serta berguna dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga agar para narapidana di dalam rumah tahanan tersebut tetap produktif meskipun ia berada di dalam rumah tahanan. Bidang kegiatan yang terdapat di dalam rumah tahanan kelas IIB Negara yaitu, bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, dan bidang bengkel kerja.

Rumah Tahanan Kelas IIB Negara ini bekerja sama dengan pihak ke-3 dalam kegiatan industri dalam upaya pembinaan dimana rumah tahanan diberikan modal usaha berupa bibit untuk dipelihara. Hasil-hasil dari kegiatan industry di dalam upaya pembinaan ini dibagi kepada para narapidana yang terjun langsung dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari wawancara yang dilakukan terhadap salah satu staff yaitu bapak Nyoman Tulus :

“Iya kami disini bekerja sama dengan pihak ketiga, kami diberikan bibit babi. Kemudian bibit tersebut kami pelihara, sampai besar kemudian kami

ternak untuk mendapatkan lebih banyak hasil. Nanti apabila sudah memiliki anak, babi tersebut kami jual kemudian hasilnya kami putar untuk bidang pembinaan yang lain seperti perkebunan, perikanan, dan meubleir namun apabila hasilnya ada lebih kami juga berikan kepada narapidana yang terjun langsung. Terkadang kami juga mendapat sumbangan dari dinas-dinas seperti kemarin kami dapat sumbangan dari dinas perikanan berupa bibit lele dan juga nanti kami akan mendapat sumbangan kambing yang kandangnya masih kami buatkan di belakang rutan ini”.

Dengan adanya kegiatan industri di dalam rumah tahanan dalam upaya pembinaan ini selain untuk tujuan pemasyarakatan, juga akan menghasilkan individu-individu yang produktif sehingga nanti apabila narapidana tersebut telah bebas mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan hasil dari ilmu yang mereka dapatkan di rumah tahanan tersebut. Dengan timbulnya individu-individu yang produktif seperti ini selain membuka lapangan pekerjaan juga akan menciptakan bibit-bibit pengusaha yang membuka sentra-sentra baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang terdapat pada kecamatan Negara.

Rumah tahanan kelas IIB Negare dipilih sebagai objek dari penelitian ini. Adapun alasan dilakukannya penelitian pada rumah tahanan kelas IIB Negara ini yaitu, pertama rumah tahanan kelas IIB Negara merupakan rumah tahanan industri yang memiliki total narapidana dan tahanan terbanyak dari rumah tahanan lainnya yang

terdapat di provinsi Bali. Kedua rumah tahanan ini merupakan rumah tahanan industri yang melakukan kegiatan pembinaan dalam bidang industri yang bergerak pada berbagai bidang pembinaan seperti bidang perkebunan, perikanan, peternakan, meubleier dan usaha lepas lainnya yang berbeda dari rutan lainnya. Ketiga, penelitian ini unik karena seorang narapidana yang ikut terjun langsung dalam pengelolaan modal yang diberikan.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa pengelolaan keuangan pada kegiatan WBP di rumah tahanan kelas IIB Negare belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut terkait, perputaran arus kas atau pembagian hasil dari kegiatan industri bidang satu ke bidang lainnya belum jelas dan belum memiliki alur yang pasti. Dalam pencatatan keuangan dari kegiatan binaan pun belum memberikan informasi yang jelas, baik bagi staff, warga binaan maupun pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Selain itu, dalam kegiatan industri WBP belum terdapat kejelasan dalam aturan atau wewenang dalam proses kegiatan industri WBP, khususnya terkait pembagian hasil dan pemberian informasi dari kegiatan UMKM dalam upaya pembinaan tersebut. Sehingga hasil dari kegiatan warga binaan belum memperlihatkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan informasi antara staff dan warga binaan, dimana menurut pendapat beberapa staff dikatakan bahwa hasil dari kegiatan industri dijadikan modal kembali untuk kegiatan industri dalam upaya pembinaan dan sisanya dibagikan kepada warga binaan yang terjun

langsung dalam UMKM tersebut. Sedangkan, pendapat yang berbeda dikatakan oleh seorang narapidana bahwa dari pengakuan pihaknya tidak memperoleh hasil yang bernilai dari kegiatan binaan tersebut lebih jelasnya, walaupun tidak memperoleh hasil yang bernilai dari kegiatan WBP tersebut, para warga binaan tetap melaksanakan kegiatan industri untuk mengisi waktu luang agar tetap produktif (observasi WBP, 2018). Sehingga dari adanya pendapat tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan di rumah tahanan kelas IIB Negara dari sisi transparansi, kejelasan, aturan/wewenang dan pemberian informasi dalam pembagian hasil kegiatan UMKM dalam upaya pembinaan WBP di rutan kelas IIB Negara tersebut.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ita Yustian (2017) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi kasus Pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman)”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pelaku dari UMKM itu sendiri. Dimana pelaku UMKM dari penelitian ini yaitu seorang narapidana yang ikut terjun langsung yang hakikatnya adalah seorang yang pernah melakukan tindakan kriminal bisa ikut mengelola suatu usaha. Sedangkan pada penelitian sebelumnya pelaku UMKM yang terjun langsung yaitu pelaku UMKM seperti masyarakat pada umumnya. Selain itu objek penelitian sebelumnya berfokus pada usaha batik yang terdapat di Kabupaten Sleman, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada UMKM yang berada di dalam rumah

tahanan, yang hakikatnya adalah tempat bagi pelaku tindakan kriminal.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Bungin dalam Yustian (2017) studi kasus adalah studi yang mendalam hanya pada satu kelompok orang atau peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, atau metode yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan melihat fenomena secara lebih mendalam. Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi awal dan menyiapkan daftar wawancara. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Negara, perwakilan narapidana masing-masing bidang, dan pihak keluarga dari narapidana yang ikut terjun langsung. Kemudian, melakukan observasi proses operasional UMKM dalam upaya pembinaan kemandirian WBP. Langkah berikutnya adalah studi dokumen yang berkaitan dengan proses operasional UMKM dalam upaya pembinaan kemandirian WBP. Kemudian, dilakukan analisis data dengan teknik analisis Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2005) untuk dibuat laporan penelitiannya. Analisis dilakukan dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan ideal pada bagian teori.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang ikut terjun langsung dalam pengelolaan UMKM dalam upaya pembinaan ini. Rumah tahanan tersebut melakukan kegiatan industri bertujuan selain untuk proses pembinaan juga agar narapidana tersebut tetap produktif

walaupun terdapat di dalam rumah tahanan. Kegiatan industri dalam upaya pembinaan ini terdapat berbagai bidang diantaranya bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang peternakan, dan bidang meubleier. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan yang terjadi pada UMKM yang terdapat di dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Negara terkait dengan transparansi serta akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan yang dilihat dari perencanaan, pencatatan, pelaporan serta pengendaliannya.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik cara, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2005) dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Keuangan yang Diterapkan Pada UMKM Dalam Upaya Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Negara**

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak UMKM dalam upaya pembinaan di Rutan Kelas IIB ini dilakukan secara sederhana. Dalam kegiatan industri, proses penjualan produk yang dihasilkan pun hanya dilakukan secara tunai dan tidak dilakukan secara kredit dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu staff:

“kami disini tidak melakukan penjualan kredit, susah. Apalagi kita disini indoor (didalam) jadi susah kalau kita harus menjual kredit, nanti nagihnya sulit. Jadinya kita jual tunai aja, biasanya kalau bidang *meubleier* kalau ada yang mesen baru kita buat. Dan biasanya kebanyakan yang memesan tidak memberikan DP kepada kita maka dari itu biasanya kita pinjamkan dulu pada bidang-bidang yang lain mengingat biaya yang dikeluarkan juga lumayan untuk pembuatan misalnya satu buah lemari dan lainnya.”

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proses penjualan yang dilakukan hanya melayani secara tunai saja dan tidak dilakukan secara kredit. Mengingat proses operasional usaha ini juga melibatkan seorang narapidana yang biasanya masyarakat berfikir bahwa narapidana adalah seorang yang pernah melakukan suatu tindakan kriminal. Maka dari itu apabila melakukan penjualan secara kredit dianggap terlalu sulit oleh pihak UMKM. Proses penetapan harga yang dilakukan pada masing-masing produk didasarkan pada harga pasaran dari produk tersebut. Pihak UMKM tidak menuntut untuk mencari keuntungan yang lebih dari setiap produk. Dalam bidang *meubleier* proses penetapan harga dilakukan berdasarkan atas biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pembuatan produk tersebut. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu staff dalam kegiatan industri dalam upaya pembinaan ini :

“kami disini untuk penentuan harganya tidak menuntut untuk harus ambil banyak untung, paling modal kita sudah balik saja sudah senang biasanya kalau di *meubleier*. Keuntungan kita ambil paling cuma sedikit berbeda dengan pedagang-pedagang lain diluar sana yang mengambil banyak untung dari penjualan produknya. Kadang kalau harga bunga pacar itu juga berapa harga pasarannya berapa ditawarkan sama pedagang di pasar kita kasih-kasih saja. Karna kita juga gak yang menuntut sekali harus sekian-sekian pasti pedagang juga tau diri, kalau untuk bidang perikanan dan peternakan kita menjualnya berdasarkan harga pasarannya.”

Dapat disimpulkan bahwa proses penentuan harga dilakukan berdasarkan harga pasaran dari produk yang dihasilkan. Namun juga tetap memperhatikan modal yang telah dikeluarkan. Pihak UMKM tidak menetapkan target di dalam proses penjualan serta pemerolehan keuntungannya.

Proses perencanaan merupakan suatu proses untuk memilih jalan terbaik yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan ini dilakukan untuk melakukan perencanaan kedepannya dari UMKM tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Robbins dan Coulter dalam Ayu, (2017:13) perencanaan merupakan menentukan strategi untuk mencapai tujuan tertentu dan perencanaan secara menyeluruh untuk mencapai mengintegrasikan dan

mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi. Kuswadi dalam Yustian (2017) mengatakan bahwa kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Anggaran merupakan suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan dan dinyatakan dalam bentuk moneter. Adisaputro, Anggarini dalam Yustian, (2017). Anggaran sebagai alat pencapaian tujuan perusahaan, yaitu dalam rangka memperoleh laba, Yustian (2017).

Di dalam kegiatan industri dalam proses pembinaan ini, pihak dari UMKM tidak membuat perencanaan secara keseluruhan, mengingat kegiatan UMKM ini hanya sebatas kegiatan pembinaan untuk para narapidana. Kegiatan UMKM ini tidak melakukan produksinya setiap hari melainkan pihaknya hanya memproduksi apabila terdapat pesanan. Proses perencanaannya dibuat tidak berlaku untuk semua bidang melainkan hanya dalam bidang bengkel kerja atau *meubleier* saja. Dibuktikan dalam hasil wawancara dengan salah satu staff yang ikut terjun langsung sebagai berikut :

“kita disini tidak membuat perencanaan mengingat kita hanya kecil-kecilan saja dan juga kita tidak setiap hari memproduksi melainkan hanya saat menerima pesanan saja. Proses perencanaan pun tidak berlaku untuk semua bidang melainkan hanya di bidang *meubleier* saja, mengingat bidang tersebut memerlukan biaya yang banyak dan harga bahan-bahannya juga mahal harganya. Makanya kami tidak membuat perencanaan, selain itu ribet juga kalo

kita harus buat perencanaan semua bidang dan menghabiskan waktu yang banyak dan juga kami disini hanya sebatas kegiatan pembinaan saja.”

Hal tersebut kurang sejalan dengan pendapat Suandy dalam Kholifatun (2015:12) yang mengatakan bahwa perencanaan itu sangat penting dilakukan karena perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selain itu pembuatan perencanaan juga dapat menentukan arah yang jelas terkait dengan prosesnya. Perencanaan yang dibuat oleh UMKM dalam rumah tahanan Negara hanya sederhana saja terkait dengan bahan-bahan yang dibutuhkan serta biaya-biaya dari bahan-bahan yang dikeluarkan. Mengingat pada bidang *meubleier* membutuhkan banyak biaya untuk membuat pesanan seperti contoh 1 buah lemari. Pihak pemesan tidak memberikan DP atau uang muka disaat memesannya. Untuk itu biaya-biaya yang dikeluarkan di pinjamkan melalui kas pada bidang yang lain apabila terdapat kekurangan. Dibuktikan dari hasil wawancara dengan staff yang ikut terjun langsung dalam proses kegiatan industri ini yaitu bapak Nyoman Tulus :

“iya kadang yang mesen gak ngasih DP jadi kita harus minjem dulu di bidang lain kalau kurang dan kita juga gak mencatat diingat saja, tapi nanti

kalau udah lunas ya kami kembalikan lagi.”

Dalam hal ini kas dipegang oleh satu staff yang khusus memegang kas tersebut sekaligus mengawasi jalannya proses kegiatan industri. Pihak staff langsung mengambilkan kas untuk pembelian bahan-bahan dalam bidang lain apabila terdapat kekurangan dan tidak melakukan proses pencatatan melainkan pihaknya hanya mengingat bahwa pihaknya meminjamkan kas dari bidang lain untuk biaya pembelian bahan-bahan 1 buah lemari. Namun apabila lemari tersebut sudah jadi dan sudah dibayar lunas, pihaknya langsung mengembalikan kas yang telah di pinjam dari bidang lain untuk pembelian bahan-bahan almari tersebut.

Untuk bidang perkebunan, peternakan, perikanan pihaknya tidak membuat perencanaan. Pembuatan perencanaan dianggap terlalu ribet dikarenakan proses usaha yang kecil dan juga sederhana. Dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu staff yang ikut terjun langsung dalam kegiatan UMKM yaitu bapak Nyoman Tulus :

“kami gak buat perencanaan ribet kalau harus buat perencanaan. Prosesnya hanya segitu-segitu saja dan juga usaha kami kecil dan Cuma sebatas pembinaan saja. Menghabiskan banyak waktu dan biaya kalau harus buat perencanaan.”

Pembuatan perencanaan dilakukan agar proses yang dianggarkan sesuai dengan target realisasi yang telah ditetapkan. Namun proses perencanaan juga dianggap

ribet apabila diterapkan pada usaha yang kecil dan juga proses operasionalnya sederhana sama halnya dalam usaha UMKM dalam upaya pembinaan ini. Pihaknya tidak membuat menerapkan pembuatan perencanaan dalam semua bidang melainkan hanya dalam bidang *meubleier* saja dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan lumayan besar.

Proses pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis (Yustian, 2017). Proses pencatatan yang dilakukan dalam UMKM dalam upaya pembinaan ini dilakukan secara sederhana dan tidak berdasarkan SAK EMKM yang berlaku melainkan proses yang dilakukan yaitu proses pencatatan 2 kolom, mengingat sumber daya pengetahuan yang dimiliki pihak staff sangat minim. Yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu staff yang ikut terjun langsung dalam kegiatan industri dalam upaya pembinaan :

“proses pencatatannya gitu aja dah soalnya kita gak yang terlalu ribet hanya sekedar aja selain itu juga pengetahuan kita terhadap akuntansi sangat minim jadinya tidak usah ribet-ribet.”

Dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan dilakukan dengan sangat sederhana yaitu terdiri dari kolom 1 pemasukan, kolom 2 pengeluaran. Proses pencatatan ini penting diterapkan di dalam UMKM untuk membantu di dalam proses pengelolaan keuangannya dalam pembuatan suatu laporan keuangan. Pencatatan juga penting dilakukan guna membantu

pengelola di dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan serta untuk dapat mengambil keputusan.

Dalam kegiatan industri dalam upaya pembinaan ini masing-masing bidangnya di berikan buku kas untuk mencatat pengeluaran serta pemasukan yang terjadi. Proses pencatatan dilakukan oleh masing-masing bidang setelah itu hasil dari pencatatan masing-masing bidang di setor kepada atasan setiap 10 hari sekali beserta dengan uang hasil dari penjualannya.

Proses pencatatan di masing-masing bidang dilakukan oleh pihak narapidana yang bekerja di kegiatan tersebut. Pihak atasan mempercayai narapidana yang bekerja melakukan proses pencatatan untuk setiap 10 harinya dan perekapan pencatatan setiap bulannya dilakukan oleh pihak staff yang ikut terjun langsung didalam kegiatan industri tersebut. Kegiatan industri dalam upaya pembinaan ini hanya melakukan penjualan secara tunai saja dan tidak melakukan penjualan secara kredit, untuk itu proses pencatatannya juga hanya terkait dengan proses pemasukan penjualan secara tunai dan proses pengeluaran yang terkait dengan bidang kegiatan industri tersebut.

Menurut Yustian, (2017) pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memosting ke buku besar, dan buku besar pembantu yang nantinya ditutup setiap akhir bulannya kemudian dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Proses pelaporan ini

bertujuan untuk melaporkan hasil dari kegiatan dari aspek finansial maupun non finansial. Menurut Bastian dalam Primayanti (2017) tujuan utama pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sebagian besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Proses pelaporan yang dilakukan oleh UMKM dalam upaya pembinaan ini hanya sebatas proses pelaporan dari aspek non finansial yaitu proses kegiatan dari kegiatan industri ini sebagai bukti kegiatan pembinaan yang dilaporkan kepada Ditjen Pemasarakatan terkait dengan aspek non finansial pihak UMKM dalam upaya pembinaan ini tidak melakukan pelaporan dikarenakan kegiatan industri ini dilakukan hanya sebatas proses pembinaan saja. Selain itu pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya di dalam UMKM ini masih sangat minim terkait dengan proses pembuatan laporan keuangan. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu staff yang ikut terjun langsung di dalam kegiatan industri ini :

“kita tidak melakukan proses pelaporan finansial. Usaha kita juga hanya sebatas untuk proses pembinaan saja dan tidak mengejar keuntungan. Paling kita melaporkan kegiatannya saja yang dilaporkan kepada ditjen.. kalau untuk proses pelaporan keuangan saya rasa terlalu ribet, kami juga tidak memiliki pengetahuan terkait dengan akuntansi. Selain itu juga menghabiskan waktu dan biaya

yang sangat banyak. Ya itu saja sudah kita buat pencatatan kas itu saja terkait dengan pengeluaran dan pemasukan.”

Hal tersebut kurang sependapat dengan Soewardjono dalam Primayanti (2017) yang mengatakan bahwa proses akuntansi dalam pelaporan keuangan merupakan mekanisme tentang cara bagaimana pihak-pihak dan sarana-sarana pelaporan keuangan berinteraksi sehingga menghasilkan informasi mengenai laporan keuangan termasuk kewajaran akan suatu laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh pihak UMKM dalam upaya pembinaan ini hanya terkait pelaporan hasil kegiatannya saja sebagai bentuk pelaporan kegiatan pembinaan di dalam Rutan Kelas IIB ini kepada ditjen. Proses pelaporan dalam aspek finansial dianggap kurang penting dikarenakan prosesnya yang memerlukan waktu, pengetahuan, dan biaya yang banyak. Untuk itu pihaknya hanya menggunakan hasil dari proses pencatatan itu saja untuk melihat perkembangan dari kegiatan industri ini.

Proses pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi, apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan (Yustian, 2017). Selanjutnya Yustian (2017) mengatakan bahwa proses pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian juga membantu pengelola di dalam proses penyusunan laporan keuangan sebagai bukti-bukti.

Proses pengendalian yang dilakukan di dalam kegiatan industri dalam upaya pembinaan ini dilakukan dengan menggunakan nota-nota di dalam proses pengeluarannya. Mengingat pencatatan kas yang dilakukan oleh narapidana sendiri yang hakikatnya adalah seorang yang melakukan tindakan kriminal maka dari itu pihak atasan mengharuskan pihak narapidana dari masing-masing bidang untuk menggunakan nota di setiap pengeluaran yang ada. Namun tidak juga diharuskan, apabila pembelian yang dilakukan hanya bernilai kecil, namun pihak narapidana harus tetap mencatat pada buku kas umum dalam bidang yang di tekuninya. Dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu :

“proses pengendalian kita menggunakan nota-nota saja, namun kadang kalau untuk pembelian yang kecil seperti beli air untuk mereka minum kami tidak mengharuskannya. Selain itu juga narapidana disini mereka sudah mengerti kok, dengan mereka diberikan kebebasan saja sudah senang sekali tidak mungkin sampai mereka berani melakukan pencurian kas walupun peluangnya kadang saja bisa juga tapi saya percayakan pada mereka.”

Proses pengendalian juga terkadang pihak atasan melakukan control setiap harinya untuk melihat langsung kegiatan yang berjalan. Proses pengendalian juga biasanya dilakukan dengan melakukan rapat evaluasi kegiatan. Namun lain halnya dalam kegiatan industri dalam upaya pembinaan ini. Proses pembinaan ini tidak semata-mata mengharuskan mengejar keuntungan

melainkan hanya sebatas proses pembinaan saja agar nantinya apabila narapidana telah bebas mereka bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat berguna bagi masyarakat banyak.

### **Manfaat yang Didapat Oleh Staff dan Narapidana dengan Adanya UMKM Dalam Upaya Pembinaan Kemandirian**

UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi penggerak utama perekonomian Negara yang keberadaannya tidak mudah tergerus oleh faktor luar. Perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi angka pengangguran di Indonesia dianggap mampu dalam menyelamatkan roda perekonomian di Indonesia. Dengan adanya UMKM dalam upaya pembinaan ini dapat memberikan bekal ilmu terhadap narapidanya. Seperti yang kita ketahui tujuan dari pembinaan adalah untuk membina narapidananya agar kelak apabila narapidana tersebut telah bebas pihaknya bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dan bisa berguna untuk banyak orang. Kegiatan UMKM dalam upaya pembinaan dalam Rumah Tahanan Negara ini dilakukan dengan cara membina narapidananya bagaimana cara bekerja yang profesional, bagaimana cara mengelola keuangan yang benar, mengingat kas hasil penjualan yang di setor setiap 10 kali sehari tentu saja pihak dari narapidana masing-masing bidang yang memegang kas tersebut. Mengingat narapidana merupakan seorang yang pernah melakukan suatu tindakan kriminal yang tentu saja terdapat ketakutan tersendiri di mata masyarakat.

Adanya UMKM dalam upaya pembinaan kemandirian Warga Binaan

Pemasyarakatan membuat narapidana menjadi tidak sumpek maupun *stress* dikarenakan suasana yang ada di dalam Rumah Tahanan ini. Dibuktikan dari hasil wawancara terhadap salah satu narapidana:

“iya supaya tidak *stress* karena kan kita diem-diem aja lebih baik kita dikasih kerjaan daripada harus diem-diem aja waktunya juga gak kerasa selain itu juga kita dipercayakan, dan juga kita bisa lebih belajar terkait dengan bagaimana cara mengelolanya, biasanya kalo di *meubleier* itu kita bisa belajar seperti buat pintu, meja dan lainnya. Jadinya kalau bebas kita punya ilmu mbak siapa tau kita bisa buka usaha sendiri nanti.”

Dengan demikian adanya UMKM dalam upaya pembinaan kemandirian warga Binaan Pemasyarakatan ini dapat membantu warga binaan agar apabila pihaknya telah bebas mereka memiliki bekal dan dapat membuka usaha kecil-kecilan hasil bekal ilmu yang mereka dapatkan setelah menjalani proses pembinaan di dalam Rumah Tahanan yang tentunya dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran yang terjadi. Terkait dengan staff yang memberikan pembinaan ini pihaknya tidak mendapatkan apapun berupa materi dari UMKM dalam upaya pembinaan ini melainkan mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang staff yang mengabdikan di dalam Rumah Tahanan. Keuntungan yang di dapatkan dari hasil kegiatan UMKM ini dikumpulkan dan diputar untuk modal kedepannya mengingat Rumah Tahanan tidak mendapatkan anggaran untuk melangsungkan proses

pembinaan ini. Namun terkadang apabila terdapat hari raya seperti galungan pihaknya membeli babi hasil dari kegiatan penjualan dalam upaya pembinaan ini hanya sekedar untuk kesejahteraan narapidana dan staff yang kemudian di potong dan dibagi-bagi kepada staff dan narapidana yang tinggal di dalam Rumah Tahanan. Dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu staff yaitu bapak Nyoman Tulus :

“tapi kami kalau sudah hari raya itu membeli babi kemudian kita potong untuk dibagi-bagi ke staff yang bekerja dan ke narapidana yang ikut terjun langsung dalam kegiatan ini dan kalau untuk yang muslim biasanya kita kasi uang seharga daging babi yang harusnya di dapatkan untuk narapidananya.”

Proses bagi-bagi daging babi ini merupakan suatu rutinitas yang dilakukan oleh Rumah Tahanan menjelang hari raya galungan pihak rumah tahanan melakukan potong babi dan dibagi-bagi sekedar untuk kesejahteraan staff dan narapidananya. Mengingat narapidana yang tinggal di dalam Rumah Tahanan bukan agama hindu saja, diperuntukan bagi agama non hindu biasanya diberikan uang sebesar harga daging babi yang harusnya di dapatkan. Hal ini dilakukan untuk menambah keakraban diantara narapidana dan staff agar narapidana tidak terlalu tertekan dengan keadaan yang ada di dalam Rumah Tahanan. Dengan dilakukan rutinitas seperti itu pihak narapidana juga merasakan dirangkul oleh staff dan tidak semata-mata dituntut harus bekerja saja.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan UMKM Dalam Upaya Pembinaan Warga Binaan Masyarakat di Rumah Tahanan Kelas IIB Negara.**

Menurut Widnyana (2018) transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengolah manajemen utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Transparansi yang dilakukan oleh pihak manajemen UMKM yaitu untuk internal saja. Dimana pihaknya tidak melaporkan kepada Direktorat Jendral Masyarakat disebabkan karena pihaknya tidak mendapatkan anggaran dari pusat. Transparansi hanya dilakukan untuk pihak internal saja yaitu kepada atasan atau kepala rutan dan staff yang lain. Transparansi juga tidak dilakukan secara formal seperti rapat intern pada umumnya yang mengumumkan terkait dengan penghasilan yang di dapatkan melainkan hanya sebatas pembicaraan *spontan* yang dilakukan oleh staff yang bertanggung jawab atas kegiatan industry ini. Transparansi juga dilakukan oleh pihak ke-3 terkait dengan pendapatan yang dihasilkan. Namun transparansi yang dilakukan tidak berlaku untuk semua bidang melainkan terkait dengan bidang yang terdapat kerja sama saja. Transparansi dilakukan terkait dengan seberapa pendapatan yang

dihasilkan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dibuktikan dengan hasil wawancara oleh salah satu staff yang ikut terjun langsung yaitu Bapak Nyoman Tulus:

“iya kami cuma untuk internal saja, dikarenakan kami juga tidak dapat anggaran makanya kami tidak melaporkan ke ditjenpas, namun seberapa kas yang ada ataupun pendapatan pengeluaran semua itu diketahui oleh kepala rutan. Staff yang lain juga tau berapa-berapa yang didapatkan karena saya memberitau walaupun cuma spontan gitu aja tapi mereka semua mengetahui. Pada pihak ke-3 juga kami gitu memberi tau berapa-berapa pendapatan hasil jual babi dan pengeluarannya juga kami kasi tau.”

Transparansi juga dilakukan oleh pihak narapidana yang bekerja langsung dalam kegiatan industri ini. Dimana pihak narapidana langsung yang melakukan pencatatan setiap harinya tentu saja pihaknya mengetahui berapa pendapatan yang dihasilkan setiap harinya atau setiap bulannya. Menurut Abdul dalam Widnyana (2018) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi bertujuan untuk menjamin “kebersihan” (bebas korupsi) penggunaa dana sehingga meningkatkan kepercayaan anggotanya.

Menurut Bastian dalam Primayanti (2017) mengatakan bahwa pertanggungjawaban adalah proses yang dilakukan kepala atau ketua organisasi dalam menyampaikan pencapaian kinerja dan keadaan keuangan organisasi kepada pihak yang berkepentingan serta masyarakat. Akuntabilitas yang dilakukan pihak pengelola yaitu terkait dengan proses kegiatan industrinya saja tidak terkait dengan pengelolaan keuangannya mengingat rutan tidak mendapat anggaran terkait dengan proses pembinaan ini. Akuntabilitas yang dilaporkan terkait dengan kinerja industri dalam upaya pembinaannya saja terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pembinaan ini. Akuntabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan hanya ditujukan kepada kepala rutan dan pihak ke-3 yang diajak bekerja sama. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan serta profesional amatlah penting untuk terciptanya suatu pengelolaan keuangan yang baik.

#### **IMPLIKASI**

Implikasi dilakukannya penelitian ini adalah dapat diungkapkan bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh UMKM. Melalui penelitian ini, pelaku UMKM dapat mengetahui betapa pentingnya pengelolaan keuangan di dalam suatu usaha. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu untuk melakukan monitoring dan membantu upaya untuk melakukan “analisa” apakah usahanya sehat atau tidak, membantu pemilik untuk melakukan “kontrol” bila yang menjalankan usaha itu orang lain, dan mengembangkan

sikap keterbukaan & kejujuran (Layyinaturrobaniyah dan Muizu, 2017).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat di dalam penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan UMKM rumah tahanan Negara dalam upaya pembinaan yang terjadi dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut. Pertama, Rumah Tahanan Kelas II B Negara menerapkan pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pencatatan, dan pengendalian. Kedua, manfaat yang didapatkan oleh staff dan narapidana dengan adanya UMKM dalam upaya pembinaan adalah staff tidak mendapatkan apapun dari hasil kegiatan UMKM, tetapi staff hanya menjalankan dan mengabdikan saat bekerja dalam rumah tahanan, kemudian untuk narapidana kelak apabila telah bebas bisa kembali ke tengah masyarakat dan berguna bagi orang banyak. Ketiga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UMKM dalam upaya pembinaan dilakukan untuk pihak internal saja dimana mengingat UMKM sendiri tidak mendapatkan anggaran apapun dari pemerintah pusat untuk menjalankan kegiatan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, pengelolaan keuangan yang dilakukan sebaiknya akan lebih baik lagi apabila ditingkatkan terkait dengan perencanaan untuk semua bidangnya. Agar pihaknya dapat mengetahui apakah hasil

yang di dapatkan sudah sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pengelolaan keuangan yang hanya dilakukan dan dipegang oleh satu orang membuat transparansi dari pengelolaannya kurang akurat yang akan menimbulkan suatu tindak kecurangan. Selain itu diperlukan adanya akuntabilitas secara tertulis terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut karena akuntabilitas sangat penting dilakukan di dalam suatu usaha agar pertanggung jawaban dari pengelolaan keuangan suatu usaha tersebut jelas dan meminimalisir terjadinya suatu tindak kecurangan (*fraud*). Selain itu diperlukan catatan tertulis dan rapat intern secara khusus didalam pembagian hasil dengan pihak ketiga dan diketahui oleh kepala rumah tahanan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tindak kecurangan terkait dengan hasil yang didapatkan. Kedua, diharapkan hasil dari kegiatan penjualan yang didapatkan untuk narapidana yang bekerja mendapatkan hasil yang setimpa dari kerja keras setiap bulannya. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah motivasi untuk narapidana yang bekerja sehingga mereka merasa senang dan lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Terkait dengan staff yang ikut terjun langsung sebaiknya lebih memperhatikan lagi pengelolaan keuangan yang baik, karena betapa pentingnya pengelolaan keuangan di suatu usaha untuk mencapai kesuksesan. Ketiga, sebaiknya transparansi yang dilakukan diperlukan rapat secara khusus untuk menginformasikan terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dan berdasarkan

e-ISSN: 2614 – 1930

pencatatan-pencatatan yang telah ada untuk lebih akurat yang diketahui langsung oleh kepala rumah tahanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kholifatun. 2015. *Fungsi Perencanaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah Haji dan Umroh Periode 2014 (Studi Kasus Pada PT. Fachry Putra Alhabsyi Perwakilan Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Layyinaturobaniyah , Wa Ode Zusnita Muizu. 2017. *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Di Desa Purwadadi Barat Dan Pasirbungur Kabupaten Subang. Pekbis. Jurnal, Vol.9, No.2, Juli 2017 : 91-103. Departemen Manajemen Dan Bisnis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjadjaran*
- Primayanti, Ni Putu Ayu. 2017. *Sistem Pengelolaan Keuangan Pada Alilitan Karya yang Dilaksanakan Masyarakat Catur Desa Adat Dalem Tamblingan*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Yustian, Diyana Ita. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Studi Kasus Pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Widnyana, Gusti Nyoman Ari. 2018. *Transparansi Pengelolaan Pungutan Dana Krama Tamiu Dan Dampaknya Di Desa Pakraman Bangkang, Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.